

**Konteks Sosial, Politik, dan Budaya
dalam Sastra Drama Tahun 1970-an:
Studi Kasus pada “Kisah Perjuangan Suku Naga”
Karya W.S Rendra
dan “Maaf, Maaf, Maaf” Karya N. Riantiarno**

M. Yoesoef
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Pesona kekuasaan, baik di ranah keluarga (domestik) maupun di ranah umum (publik) senantiasa memicu pergolakan di antara anggota keluarga dan masyarakat luas. Dalam pada itu, para birokrat yang mengemban tugas pemerintahan dapat dikatakan sebagai ujung tombak untuk menyejahterakan masyarakat melalui program-programnya. Namun demikian, dinamika di lapangan, selain hal positif juga menimbulkan efek negatif, yang berkaitan dengan perilaku birokrat dalam hal implementasi program-program itu. Hal itu terekam dalam ingatan kolektif masyarakat dan menjadi batu besar yang menghalangi pandangan. W.S. Rendra dan N. Riantiarno melalui karyanya merekam ingatan kolektif itu menjadi sebuah drama yang menyindir dan kritis. Di balik karyanya itu, mereka memberi ingatan kepada kita betapa eksekusi dari proses pembangunan sepanjang tahun 1970-an menuai opini yang perlu dicermati di masa sekarang ini.

Kata kunci: ingatan kolektif, domestik, publik, birokrat

ABSTRACT

The charm of power, whether in the family domain (domestic) or in general domain (public), always triggers turbulence among family members and wider community. In terms of that, the bureaucrats that carry the government tasks can be considered as the spearhead in order to make the society prosperous through the government's programs. The dynamics on the field, however, in addition to the positive things also cause negative effects, which are related to the bureaucrats' behaviours in the implementation of the programs. It is recorded in the society's collective memories and in turn becomes the large rock that blocks the view. W.S. Rendra and N. Riantiarno through their works recorded the collective memories into a satirical and hurtful plays. Behind their works, they reminded us how the excess of the development process throughout 1970s had generated opinions that needed to be closely observed at the present.

Keywords : *collective memories, domestic, public, bureaucrat*

A. Pendahuluan

Dekade 1970-an merupakan masa pengkonsentrasian potensi-potensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam satu tatanan baru, yang mengoreksi sistem yang diterapkan pemerintahan di bawah pimpinan Soekarno (Orde Lama). Berbekal landasan ideologis, Pancasila¹, dan UUD '45, untuk menyejahterakan bangsa dengan adil dan makmur, pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan kehidupan bernegara dengan modal potensi-potensi tersebut di atas. Pemerintah Orde Baru dengan dukungan penuh dari militer memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi dan politik. Peranan militer diperlukan dalam mengelola dan memecahkan konflik-konflik sosial-politik yang berkembang pada masa itu².

Dalam proses pembangunan itulah sejumlah perubahan mulai dirasakan dan dialami masyarakat. Pembangunan ekonomi berkonsentrasi pada penyelesaian utang luar negeri, penanaman modal asing yang melahirkan industri-industri manufaktur, dan perbaikan perekonomian rakyat. Dalam bidang politik, pembatasan jumlah partai politik dilakukan, termasuk di dalamnya penataan organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada ideologi partai. Satu-satunya ideologi partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang diakui adalah Pancasila. Pembangunan bidang ekonomi dan politik ini berdampak kepada bidang-bidang utama lainnya, seperti sosial dan budaya. Perubahan besar itu di sisi lain menimbulkan persoalan-persoalan horizontal yang erat kaitannya dengan konteks-konteks tertentu. Persoalan politik-ekonomi-sosial-budaya yang mengemuka pada dekade 1970-an antara lain Peristiwa Malari 1974, yang merupakan sebuah eskalasi politik-ekonomi yang digulirkan ke hadapan masyarakat oleh elite politik yang berkepentingan; pada tahun yang sama marak pula demonstrasi menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, sebagai sebuah koreksi terhadap proyek mercusuar dalam bidang budaya di tengah kesulitan ekonomi pada masa itu. Lemahnya partisipasi politik masyarakat secara formal

menyebabkan lahirnya unjuk rasa di jalanan. Reaksi masyarakat terhadap pemerintah tidak saja dilakukan melalui aktivitas jalanan seperti itu, tetapi juga melalui forum-forum ilmiah seperti seminar dan diskusi; secara budaya antara lain melalui karya sastra dan pidato kebudayaan.

Dalam kancah seperti itulah fungsi sosial sastrawan, sebagai anggota masyarakat dan kelas sosial tertentu, mampu menangkap fenomena di sekelilingnya untuk diungkapkan di dalam karya sastranya. Situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada tahun 1970-an direkam oleh para sastrawan untuk mengingatkan masyarakat, menanggapi dan mengkritisi kebijakan, ataupun menyatakan sikap atas tindakan dan hasil-hasil tindakan yang kurang tepat ditinjau dari sisi etika, moral dan kemanusiaan. Media seni yang dipandang tepat sasaran untuk menyatakan semua hal itu adalah dalam bidang penulisan sastra drama dan pertunjukan drama, sehingga gagasan dan tanggapan para sastrawan itu dapat disampaikan secara visual dan langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks kesenian, tahun 1970-an merupakan era pembaruan dalam penciptaan karya secara intrinsik yang menumbuhkan estetika baru dalam berkesenian. Di samping pembaruan secara intrinsik tersebut, pokok-pokok persoalan yang digarap bersumber kepada masalah-masalah kontekstual zaman yang meliputi persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Wujud dari masalah-masalah tersebut yang diejawantahkan melalui media karya seni, sastra drama khususnya, dibahas dalam artikel ini, yaitu karya sastra drama yang ditulis pada tahun 1970-an oleh Rendra ("Kisah Perjuangan Suku Naga" dan "Sekda") dan Nano Riantiarno ("Maaf, Maaf, Maaf"). Pemilihan ketiga sastra drama di antara sejumlah sastra drama yang ditulis pada tahun itu dilandasi oleh pemikiran bahwa ketiganya mengandung persoalan-persoalan sosial, politik, dan budaya yang berkembang pada tahun 1970-an itu. N. Riantiarno membicarakan konteks kejiwaan yang bersumber budaya dan hierarki kekuasaan; W. S. Rendra mengangkat permasalahan birokrasi dan perilaku birokrat

dalam menjalankan program-program pemerintah atas nama pembangunan. Ketiga karya sastra drama itu menggambarkan simpul-simpul penting yang merefleksikan sedikit dari sekian banyak eksekusi proses pembangunan di masa awal Orde Baru. Sejumlah drama yang ditulis pada tahun 1970-an setidaknya menandai adanya keterkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat—sebagai ranah dan objek konkret—dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Sastrawan berusaha menangkap saripati dari perubahan itu untuk disampaikan kepada masyarakat itu sendiri.

W.S. Rendra: Kolusi dan Korupsi

Drama "Kisah Perjuangan Suku Naga" ditulis Rendra pada tahun 1975. Drama ini berisi kritikan dan sindiran yang tajam mengenai korupsi, bantuan modal asing, dan eksplorasi lingkungan. Kritik dan sindiran itu terlihat melalui gambaran sebuah kerajaan, Astinam, yang diperintah oleh Sri Ratu. Kendati bentuknya kerajaan, pemerintahan Sri Ratu menggunakan sistem demokrasi sehingga pemerintahan Astinam adalah monarki demokratis. Dalam memerintah ia mengangkat seorang Perdana Menteri yang memiliki kabinetnya sendiri. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki parlemen dan Undang-Undang Dasar.

Astinam adalah kerajaan yang makmur, aman sentosa, dan tanahnya subur. Untuk membangun kerajaan itu menjadi negara yang modern, Sri Ratu mengundang para investor asing untuk menanam modalnya di Astinam. Kesempatan itu disambut dengan gembira oleh para pemodal asing, dan dalam waktu singkat modal dan teknologi modern mengalir ke Astinam. Pengeksplorasi alam secara besar-besaran pun dilakukan. Salah satu kekayaan alam Astinam yang belum tergarap adalah tembaga yang ada di sebuah perkampungan tradisional bernama Suku Naga.

Kehidupan di perkampungan Suku Naga yang semula tenteram tiba-tiba diusik oleh rencana pembukaan tambang tembaga dan menjadikan daerah itu sebagai kota pertambangan yang modern. Proyek yang

didanai pemodal asing yang kemudian dikenal sebagai bantuan luar negeri, ditentang oleh para pemuka Suku Naga karena proyek itu dapat merusak lingkungan dan dapat menyebabkan lenyapnya peradaban tradisi yang mereka pelihara secara turun-temurun. Namun, penolakan ini dianggap sebagai tindakan menghambat pembangunan.

W. S. Rendra mengemas drama ini dengan mempertunjukkan berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang berfokus pada kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah, kebebasan pers, fungsi dan peranan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Hal lain yang juga disinggung adalah masalah dampak pembangunan pada lingkungan hidup dan masalah tradisi dan modernisasi. Persoalan-persoalan itu bermuara kepada satu hal, yaitu bagaimana kekuasaan dan keputusan-keputusan atas dasar kekuasaan semata berdampak pada terciptanya keresahan, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan di kalangan masyarakat Suku Naga.

Birokrasi: Kebijakan dan Penyelewengan

Dalam proses pembangunan, pemerintah melalui aparat birokrasinya melakukan berbagai keputusan umum berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dijalankan baik oleh aparatur negara maupun masyarakat. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan dan pelaksanaan di lapangan terjadi rumpang yang jaraknya bisa berjauhan. Rumpang itu berpotensi pada timbulnya interpretasi yang beragam sehingga dipahami sesuai dengan konteks dan kebutuhan di lapangan. Pada kutipan berikut, Rendra melalui tokoh Dalang mengomentari logika penguasa dalam hal kebijakan mengenai pengamanan pembangunan. Tokoh Dalang itu berkata "*Tanpa bisa dikontrol! Lepas bebas sesukanya! Inilah anarki. Peraturan hanya dipakai untuk mengontrol rakyat! Tetapi tak bisa dipakai untuk mengontrol penguasa. Ini namanya liar!*" Cakapan itu mengenai 'anarki kekuasaan' yang dilihat melalui tindakan aparatur negara di lapangan. Secara lengkap, suasana munculnya cakapan tersebut dapat dibaca pada kutipan berikut.

"Sri Ratu : Sayang tidak semua yang berpikir seperti kita
 Sri Ratu : Sayang tidak semua orang berpikir seperti kita.
 Dalang : Berbeda pendapat kan wajar namanya!
 Perdana Menteri : Banyak pikiran yang menentang kemajuan.
 Sri Ratu : Dan mengganggu jalannya pembangunan.
 Kol.Srenggi : Pendeknya mereka bikin keki!
 Sri Ratu : Dalam keadaan bloodrekku kumat begini komentar-komentar mereka bikin repot saja.
 Perdana Menteri : Bagaimana tidak akan merepotkan! Bayangkan saja seandainya seseorang sibuk menyapu halaman sedang sementara itu orang lain seenaknya saja melemparinya dengan komentar-komentar. Ini namanya kan mengganggu orang bekerja.
 Dalang : Logika macam apa ini? Bikin perbandingan kok curang. Emangnya ngurus pemerintah sama dengan bekerja menyapu halaman? Kalau begitu jangan jadi menteri, jadilah tukang sapu saja.
 Perdana Menteri : Sri Ratu, jalan pembangunan harus kita amankan.
 Kol.Srenggi : Sebagai Menteri Keamanan saya akan segera mengumumkan pernyataan bahwa mengkritik pembangunan adalah sabotase. Oleh karena itu subversif.
 Perdana Menteri : Dengan begitu tidak ada lagi oposisi.
 Kol.Srenggi : Oposisi adalah musuh!
 Sri Ratu : Bagus! Lalu kita bisa bebas membangun dengan lancar.
 Dalang : Tanpa bisa dikontrol! Lepas bebas sesukanya! Inilah anarki.
 Peraturan hanya dipakai untuk mengontrol rakyat! Tetapi tak bisa dipakai untuk mengontrol penguasa. Ini namanya liar! (Rendra, 1975)"

Bentuk lain dari 'anarki kekuasaan' adalah kolusi yang bergandengan dengan tindakan korupsi. Kedua tindakan itu berpeluang

dilakukan oleh aparaturnegara sebagaimana digambarkan Rendra melalui adegan berikut yang menyangkut pembangunan Rumah Sakit Modern "Wijaya Kusuma"³ yang membicarakan "transaksi" antara pengusaha dan penguasa.

"Perdana Menteri : Beres, Sri Ratu. Kebetulan juga banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan uangnya di sini untuk mendirikan pabrik obat-obatan.

Sri Ratu : Permohonan mereka harus diberi perhatian yang utama. Asal, juga cukup pengertian.

Perdana Menteri : Wah, pengertian mereka cukup besar. Mereka akan menyediakan 10% dari modal untuk hal-hal yang tidak terduga, yang pemakaiannya terserah seluruhnya kepada Sri Ratu, dan langsung dimasukkan ke dalam rekening bank Sri Ratu di Hong Kong.

Sri Ratu : Itu bagus.

[.....]

Mr. Joe : Bereslah! Sebagai teman negara kami bisa diandalkan, asal kami tidak dirugikan lebih dulu, kami pasti akan menjadi sahabat yang sangat membantu. Tetapi bila kami dirugikan, dengan sendirinya kami akan menarik kembali segala bantuan kami! "Kerja sama"! Itulah saja kuncinya. Di dalam kerja sama yang penting adalah tahu sama tahu.

Perdana Menteri : Cocok! Sungguh sreg bagi saya --Sri Ratu, saya pribadi berani menjamin bahwa Mr. Joe benar-benar penuh pengertian.

Sri Ratu : Itulah kenyataan yang menggembirakan.... (Rendra, 1975)"

Praktik menyogok penguasa yang dilakukan para pemodal (direpsentasikan melalui tokoh Mr. Joe) diperlukan untuk memperlancar izin dan pelaksanaan proyek di samping untuk menyingkat jalur birokrasi dengan menyediakan upeti⁴.

Kasus-kasus kolusi antara pejabat yang berwenang dengan pengusaha juga muncul dalam drama "Sekda" (1977)⁵. Keterlibatan pa-

ra pengusaha dengan para pemegang kekuasaan dalam drama ini menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi Indonesia direncanakan dan dilaksanakan. Pembangunan ekonomi ini pada dasarnya tidak seimbang, karena di satu pihak pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemodal asing, tetapi di pihak lain pemerintah menyudutkan pengusaha pribumi. Muhaimim membicarakan bagaimana perilaku kedekatan dua pihak ini.

"[...] bahwa pengusaha pribumi yang mandiri tidak dapat mengembangkan diri, karena para pejabat dan birokrat pemerintah membuat berbagai rencana dan kebijaksanaan yang tidak secara eksplisit ditujukan untuk mendorong wiraswasta asli yang potensial untuk bisa melakukan akumulasi modal ... Perkembangan itu dipercepat oleh watak birokrasi yang patrimonial dan oleh nilai-nilai tertentu dari budaya Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru, juga oleh mengalirnya modal dan bantuan luar negeri yang sirkulasinya banyak ditentukan oleh para pejabat negara (1991:6)."

Pemerintah sebagai pihak penentu kebijaksanaan pembangunan bebas melakukan berbagai langkah yang bisa mengamankan dan menyukseskan pembangunan itu. Dalam hal ini rakyat (dan wakil rakyat) adalah pihak yang diabaikan. Kendatipun rakyat diajak dalam proses perencanaan, maka jalur yang dipilih adalah jalur resmi, yaitu melalui dengar pendapat dengan wakil rakyat di DPR. Hasilnya pun bisa dipastikan pemerintah mendapat persetujuan sehingga proyek pembangunan itu mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Langkah demikian merupakan langkah yang konstitusional, namun pada kenyataannya langkah yang diambil itu tidak ubahnya dengan "sandiwara" belaka.

Topik utama yang dipilih Rendra dalam drama ini adalah perilaku korup seorang pejabat pemerintah daerah⁶. Seorang oknum pejabat negara sebagai pemegang kekuasaan mendapat fasilitas sesuai dengan posisi jabatannya, termasuk di dalamnya berbagai

kemudahan untuk memperlancar pekerjaannya. Dalam praktiknya, fasilitas-fasilitas itu tidak sepenuhnya dipakai untuk melayani masyarakat, tetapi cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi (dan keluarganya).

Maraknya tindak penyelewengan pada masa itu disebabkan kurang efektifnya penyelenggaraan kontrol, baik dari lembaga yang berwenang untuk tugas kontrol itu sendiri maupun dari masyarakat (termasuk di dalamnya adalah kalangan pers). Tindak korupsi akhirnya menjadi satu perilaku yang membudaya di masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari mentalitas manusia. Potret yang disuguhkan drama "Sekda" ini adalah kondisi-kondisi lingkungan sosial yang dipandang berpotensi memengaruhi mental seseorang untuk bertindak korupsi. Kondisi-kondisi itu, antara lain terlihat dalam kehidupan pejabat pemerintah daerah. Peluang ini dimungkinkan karena pengawasan pusat terhadap daerah umumnya tidak ketat, terutama dalam sistem desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola sumber-sumber ekonomi secara mandiri⁷. Di samping itu, secara budaya kuatnya sikap feodalisme di daerah turut menyuburkan perilaku berkuasa para pejabat tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dipotret menjadi latar dalam drama ini.

Melalui tokoh Sekda, Rendra mempertunjukkan penyelewengan oknum aparat pemerintah yang dikonstruksi oleh budaya dan sistem birokrasi yang tidak memiliki kontrol, baik dari lembaga pemerintah yang bertugas untuk pengawasan maupun dari masyarakat sendiri. Praktik itu, semakin kokoh dengan tumbuhnya hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi antara patron-klien yang saling menguntungkan. Di lingkungan birokrasi, interaksi patron-klien ini dikukuhkan oleh posisi jabatan dan juga budaya patrimonialisme⁸ yang membangun tradisi birokrasi.

Penyelewengan kekuasaan dan wewenang di lingkungan birokrasi yang kemudian juga menyebar ke lingkungan non-pemerintahan menjadi penyakit birokrasi dan sosial yang menggejala menjadi sebuah budaya korup sejak awal Orde Baru. Semua itu membuka peluang secara lebar korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Ketiga hal inilah yang menjadi salah satu tuntutan pada masa reformasi tahun 1998 pada masa akhir kejatuhan Orde Baru.

Masalah lingkungan vs industrialisasi

Masyarakat modern adalah masyarakat yang bertumpu pada industrialisasi. Untuk membangun industri diperlukan kesiapan prasarana-prasarananya, seperti sumber daya manusia, lahan, dan pasar yang kondusif. Dalam praktiknya, pembangunan masyarakat yang modern ini harus berhadapan dengan sifat masyarakat Indonesia yang agraris. Pengalihan fungsi lahan garapan menjadi lahan industri (pabrik-pabrik) mengakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian. Dari segi strata sosial pun kemudian muncul kelas baru, yaitu kaum buruh. Arti dari semua ini adalah terputusnya ikatan budaya agraris dan digantikan dengan ikatan budaya kapitalis yang modern. Sementara kesiapan masyarakat untuk menerima nilai-nilai budaya modern belum kukuh. Akibat dari itu adalah sering terjadinya persewaan antara buruh dan majikan. Di satu pihak, buruh menuntut upah yang memadai, sementara para majikan (pemilik modal) mempekerjakan mereka dengan upah minimum. Pilihan bagi rakyat menjadi tidak banyak. Mereka menerima upah itu atau tidak bekerja sama sekali. Pesona masyarakat modern ini berakibat pula pada berkurangnya minat rakyat menggarap lahan-lahan pertanian, mereka terprogram oleh kemudahan mendapat uang di pabrik-pabrik.

Gencarnya pendirian industri ini bahkan tidak jarang harus menggusur pemukiman rakyat (termasuk budaya dan tradisinya). Pada drama ini digambarkan bagaimana perkampungan Suku Naga hendak digusur dan lahannya akan dijadikan tambang tembaga serta sebuah kota modern.

"Insinyur : Ini proyek perintah Sri Ratu.

Abisavam : Ah, begitu! Lantas orang-orang desa ini bagaimana?

Insinyur : Mereka akan dipindahkan ke suatu tempat.

[.....]

Abisavam : Ya. Apa pendapatmu tentang desa dan lembah kami?

Insinyur : Luar biasa. Resep.

Abisavam : Resep! Itu tepat. Leluhur kami, leluhur para Suku Naga, telah memilih tempat ini dengan teliti. Berabad-abad sudah kami tinggal di sini. Lihat itu! Itulah pekuburan para leluhur kami. Ya, yang di lereng bukit itu. Dan di sana, dataran batu di bawah pohon itu adalah tempat upacara kami untuk mengenang daya kesuburan. Menurut kami: dewi kesuburan! Penting sekali bagi kami. Dan telaga itu, bagi kami keramat, karena di situlah kami pergi mandi mensucikan diri. Sebelum kami berpuasa 40 hari dari setahun. Kamu lihat, banyak teratai yang kami anggap sebagai lambang kesucian. Kamu lihat, semua ini bukan sekadar "suatu tempat". Melainkan suatu bagian dari keutuhan kami. Ini adalah satu kebudayaan. Ini tidak bisa diratakan begitu saja menjadi sebuah kota. Mengerti kamu.

...

Abisavam : Kewajiban sayalah untuk melindungi keutuhan kebudayaan kita – Aku suka perkembangan-perkembangan baru. Tetapi perkembangan baru toh tidak harus berarti penumpasan bagi yang lain. Sebab itu nanti namanya penindasan, bukan pergaulan (Rendra, 1975)."

Penolakan tidak saja muncul dari warga Suku Naga, tetapi juga dari seorang wartawan yang bersimpati pada nasib masyarakat Suku Naga seperti tampak pada kutipan berikut.

"Carlos: Perusahaan The Big Boss in telah melakukan joint venture dengan sebuah perusahaan negara Astinam, untuk mengerjakan penggalian dan pengolahan tambang tembaga di bukit Saloka, di dekat mana terdapat sebuah desa yang ditinggali oleh Suku Naga. Pemerintah Astinam akan mengosongkan dan akan mengubah desa tersebut menjadi kota pertambangan, lengkap dengan perumahan-perumahan untuk para pe-

kerja tambang, tempat-tempat hiburan untuk mereka, mesjid, gereja, garasi, bengkel, pabrik pengolahan, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Hal ini berarti lenyapnya tempat-tempat ibadah para Suku Naga. Tempat-tempat keramat mereka akan dinodai. Rumah-rumah adat mereka akan disingkirkan. Ini berarti, bahwa demi keuntungan yang akhirnya akan dipakai secara tidak merata, satu kebudayaan dan agama golongan minoritas akan didesak dan dilenyapkan. Tembaga yang pengolahannya di pabrik memerlukan banyak acid, akan menyebabkan polusi yang akhirnya bisa mengubah desa Suku Naga menjadi padang pasir. Contoh yang nyata dari kelengahan semacam ini sudah ada: lihatlah Copper Basin di Tennessee, Amerika Serikat. Sekarang padang pasir, dahulu hutan yang lebat. Inilah akibat polusi acid yang ditimbulkan oleh pabrik tembaga mereka, sebab mereka telah membuang kotoran pabrik itu seenaknya. Kerusakan alam selalu dimulai dengan kerusakan rumputan dan semak belukar, lalu lenyapnya serangga, ikan-ikan di sungai dan binatang-binatang kecil lainnya. Yang sebenarnya merupakan perantara dalam proses peremajaan alam. Akhirnya dari kerusakan kecil-kecil itu akan sampai pada kerusakan hutan. Tanpa zat hijau daun yang dimiliki hutan-hutan, pemurnian udara akan berkurang. Bumi, air, dan udara akan kotor, sehingga akhirnya manusia menderita juga. Tindakan mengejar keuntungan dengan mengorbankan alam dan peradaban ini pada hakikatnya bukan pembangunan, melainkan perusakan. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Peradaban Suku Naga lebih matang dan dewasa daripada peradaban yang akan dipaksakan kepada mereka (Renstra, 1975)."

Cakupan di atas merupakan sebuah advokasi dari masyarakat pers yang pada masa kini banyak pula dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi perhatiannya.

Pembangunan yang semata-mata berorientasi pada penciptaan masyarakat industri cenderung menimbulkan gejolak sosial. Era industri yang sangat tergantung pada teknologi menyebabkan adanya rumpang antara kemajuan teknologi dan kondisi sosial-budaya masyarakat yang belum siap menerima era teknologi tinggi, sehingga menciptakan kegamangan budaya. Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat Indonesia adalah modernisasi pertanian, bukan pembangunan industri pabrikan⁹. Pada kenyataannya industrialisasi di Indonesia berjalan terus seiring dengan itu bermunculan berbagai masalah sosial yang menyertainya, antara lain pengangguran, kemiskinan struktural¹⁰, kriminalitas, dan urbanisasi; masalah lingkungan yang muncul adalah rusaknya lingkungan yang disebabkan eksplorasi lahan dan hutan secara besar-besaran dan terbengkalainya program penghijauan hutan yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengantongi HPH di Kalimantan dan Papua.

N. Riantiarno: Kekuasaan dan Sukse

Nano Riantiarno menulis "Maaf, Maaf" pada tahun 1977 dan dipentaskan untuk pertama kalinya pada tahun 1978. Drama ini mengisahkan sebuah keluarga kelas menengah yang pada suatu hari dikejutkan oleh ulah Ario (kepala keluarga) yang merasa dirinya Kaisar Dasamuka dan rumah kediaman mereka disebutnya sebagai istana. Sejak itu ketenteraman dan keharmonisan keluarga itu terusik. Setiap anggota keluarga dinamai sesuai dengan nama-nama tokoh dalam *Epos Ramayana*. Istrinya dipanggil Dewi Sinta, adiknya disebut Sarpakenaka, pembantunya dipanggil Patih Prahasta, dan putra-putrinya diberi nama Gunawan Wibisana dan Trijata. Kutipan berikut menjelaskan kondisi yang dialami keluarga itu.

"Nenek: Pada suatu malam, ayahmu membangunkan semua orang. Katanya, ada Cahaya yang menitis. Lalu, dia minta Uti memainkan peran "Sinar". Coba bayangkan, Uti disuruh menyanyi

dan menari. Setua ini. Tentu saja Uti menolak. Tapi dia menangis dan memohon-mohon. Jadi tidak tega. Den Ario memanggil kami dengan nama-nama wayang. Ibumu dipanggil Dewi Sinta, Uti direkrut jadi tukang sihir dan Bandem jadi Patih Prahasta. Ayahmu mengatur tata cara sendiri. Rumah jadi istana Alang-alang Langka, mungkin maksudnya Alengkadireja, kerajaannya Rahwana. Den Ario dan Bandem mengatur adegan perang-perangan. Merencanakan dan melaksanakan lakon yang pada awalnya menggelikan, tapi lama-lama jadi biasa. Akhirnya kami merasa menjadi tokoh yang dia ciptakan itu.

Gembong: Lalu semua penghuni rumah ini tidak akan menginjak bumi lagi, karena punya peran baru. Menikmati mimpi.

Nenek: Ya, boleh dibilang begitu. Sebab semua berusaha bermain dengan meyakinkan. Untuk membuat hati ayahmu senang.

Gembong: Semua membantu Ayah, agar gilanya menjadi sempurna (Riantiarno, 1977)"

Tokoh Ario dalam keluarga menempati posisi kepala keluarga, suami, dan orang yang memiliki kewenangan utama di rumah. Dalam drama ini Nano Riantiarno meminjam wacana Dasamuka (Rahwana) sebagai bingkai ceritanya. Tokoh yang memiliki sepuluh kepala ini dikenal sebagai wujud angkara murka dan representasi pemimpin yang senantiasa menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan dan mencapai cita-citanya. Di tangan Riantiarno, tokoh Ario adalah seorang yang mengalami persoalan kepribadian, sehingga ia senantiasa berada dalam dunia fantasi yang dibangun dari simpul-simpul masa lalunya. Di balik penokohan Ario itu, pokok persoalan drama ini bermuara kepada tanggapan terhadap berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain mengenai kepemimpinan, sensor pemerintah¹¹ yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi baik seni¹² maupun menyampaikan pendapat. Dalam pada itu, kehidupan politik Indonesia yang diwakili tiga partai politik, kendatipun "partai"

yang berkuasa enggan disebut partai, sangat berkepentingan terhadap figur pimpinan nasional yang kuat dan teruji keandalannya. Dalam hal itu, kepemimpinan nasional adalah persoalan yang perlu dilanggengkan, baik secara politik maupun budaya. Pelanggengan itu harus melalui sistem demokrasi yang disebut pemilu. Di sinilah Nano Riantiarno tengah mengomentari budaya pemilu ala Indonesia yang merebak selama masa Orde Baru. Sukses kepemimpinan nasional telah melahirkan aksi-aksi dukung-mendukung (kebulatan tekad) secara verbal, selebihnya dalam proses pemilihan dan penetapan oleh MPR sekadar seremoni politik yang berulang setiap lima tahun. Pada salah satu bagian drama ini diungkapkan tentang pelanggengan kekuasaan tersebut, seperti pada cakapan berikut.

"Kaisar : Ratu, hamba ini Raja diraja. Hamba masih ingin berkuasa, tapi rakyat sudah ogah. Mereka maunya pemilu terus. Demokrasi terus. Hamba ingin mereka kembali percaya kepada hamba, tanpa melalui pemilu. Tolong Ratu Cahaya, beri tahu caranya agar keinginan hamba terwujud.

Sinar : Wah, gampang!

Kaisar : Bagaimana? Situasinya sudah seperti telur penyu di ujung tanduk banteng bergincu. Sedikit goncangan kecil saja, telur jatuh hancur berkeping-keping. Masa Ratu tega bilang gampang.

Sinar : Memang gampang. Mahkota!

(Seketika menggenggam mahkota emas)
Kamu penguasa tapi tidak tahu caranya memerintah, tidak tahu caranya memanfaatkan kekuasaan. Memerintah tidak boleh memakai perasaan, sebab raja bukan seniman. Raja harus cerdas, punya segudang ilmu taktik dan akal licik. Itu kalau kamu ingin kekuasaanmu langgeng (Riantiarno, 1977)"

Pada cakapan di atas, tampak bagaimana Kaisar Dasamuka senantiasa merasa terancam kekuasaannya oleh kekuatan partai lain ("tanduk banteng bergincu"), dan pemilu menjadi sebuah titik yang krusial dalam

hal kekuasaannya. Pemikiran Dasamuka itu dapat diasumsikan sebagai sebuah pemikiran yang senantiasa ada pada elite penguasa Orde Baru.

Keluarga Ario adalah miniatur kekuasaan mutlak yang menelurkan anarki kekuasaan dan oleh semua anggota keluarganya kondisi itu dilanggengkan menjadi sebuah budaya yang berulang-ulang semata-mata untuk "menyenangkan" Ario sebagai kepala keluarga, penguasa mutlak sebuah kerajaan sebagaimana Rahwana yang menjadi raja diraja di Alengka. Mata artistik Nano Riantiarno menjelajahi konstelasi budaya kekuasaan di Indonesia pada tahun 1970-an dan hal itu menemukan padanannya dalam diri Rahwana, simbol segala angkara murka dan kesewenangan.

B. Kesimpulan

Penulisan sastra drama pada tahun 1970-an tidak terlepas dari peran penulisnya sebagai bagian dari lingkungan masyarakat tempat ia berada. Konstelasi sosial, politik, dan budaya pada tahun 1970-an menjadi sumber penciptaan sejumlah karya sastra drama, sebagaimana diperlihatkan oleh para penulis drama yang dibahas dalam makalah ini, yaitu Rendra dan Nano Riantiarno.

Rendra melalui dua dramanya, "Perjuangan Suku Naga" dan "Sekda" mengga-

rap kritik dan tanggapan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Orde Baru dalam hal birokrasi, korupsi, kolusi, dan praktik-praktik kekuasaan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, baik secara sosial, politik, maupun budaya. Pada karya N. Riantiarno, "Maaf, Maaf" dibicarakan tentang fantasi tokoh Ario yang terbelenggu oleh latar belakang sejarah keluarganya. Ia mengalami gangguan kejiwaan dan berfantasi seolah-olah ia adalah Kaisar Dasamuka. Dengan meminjam kerangka cerita epos *Ramayana*, N. Riantiarno memanfaatkan stereotipe tokoh Dasamuka (Rahwana) untuk melontarkan jargon-jargon politik yang merepresentasikan pemerintahan Orde Baru yang berfokus pada persoalan melanggengkan kekuasaan dan peranan lembaga sensor yang dinilai berpotensi membatasi ekspresi seni dan kebebasan berpendapat.

Ketiga karya tersebut menunjukkan bahwa peran sosial seniman dalam rangka mengangkat hal-hal yang dianggap tabu diungkapkan ke ruang publik berhasil diwujudkan sebagai realitas fiksi (dan kemudian realitas pentas). Melalui wahana itu, masyarakat setidaknya mempunyai kesempatan untuk melepaskan kesumpekan-kesumpekan pikiran akibat sistem tata pemerintahan yang dibangun dan diyakini pemerintah Orde Baru, khususnya selama dekade 1970-an.

Catatan akhir:

- ¹ Pancasila dipandang dan dihayati sebagai abstraksi dari proses empiris pergolakan politik, sosial-ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, hari kelahiran Pancasila (1 Juni) dimaknai sebagai peringatan atas warisan leluhur yang tidak boleh diubah. Pancasila juga dijadikan ideologi yang mampu menengahi pertentangan ideologis, etnis, dan agama sehingga berfungsi sebagai "pemersatu" bangsa yang majemuk (Ali, 1986: 198)
- ² Harold Crouch, "Kaum Militer: Masalah Pergantian Generasi", dalam *Prisma*, Februari 1980.
- ³ "Rumah Sakit Wijaya Kusuma" dalam drama ini mengacu pada rencana pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak "Harapan Kita". Di balik rencana pembangunan itu, tersebar gosip mengenai kutipan komisi 10% untuk setiap proyek yang dibangun oleh para investor.
- ⁴ Banyak istilah yang bisa dipakai untuk menyebut pemberian upeti, seperti "Semua bisa diatur", "Yang penting tahu sama tahu", "Uang rokok", "Terserah kebijaksanaan Anda", dan lain sebagainya.
- ⁵ "Sekda" dipentaskan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tanggal 27—29 Juli 1977. Drama ini kemudian digelar kembali di Yogyakarta pada bulan November 1977. Pementasan di Yogyakarta ini menandai diizinkan kembali ia berpentas di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta setelah dilarang ketika mementaskan "Mastodon dan Burung Kondor" (1973).
- ⁶ Theodore M. Smith dalam artikelnya "Korupsi, Tradisi, dan Perubahan di Indonesia," dalam Mochtar Lubis dan James Scott (ed.) *Korupsi Politik* (Jakarta, 1993: 49) mengatakan bahwa istilah 'korupsi' mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya mencakup korupsi moneter yang konvensional, tetapi juga korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengurus pembayaran tidak resmi dari para investor (apakah itu domestik atau asing), memakai sumber pemerintah--kedudukan, martabat, status dan

atau wewenangnya yang resmi—untuk keuntungan pribadi. Demikian pula, pejabat yang mengangkat keluarga dan teman untuk jabatan di pemerintahan yang menguntungkan, tanpa mengindahkan kemampuan mereka, termasuk pada pemakaian sumber pemerintah untuk keuntungan pribadi.

- ⁷ Kehidupan pejabat daerah seperti itu pada dasarnya bersumber pada kehidupan pangreh praja pada masa kolonial. Para pejabat itu dipandang sebagai priyayi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Uraian mengenai hal ini lihat Heather Sutherland *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. (Jakarta, 1983).
- ⁸ Muhaimin, (hlm. 10)
- ⁹ Pembangunan industri pesawat terbang (IPTN) dipandang proyek mercusuar yang belum diperlukan oleh rakyat Indonesia. Biaya untuk proyek itu dapat dipakai untuk membangun modernisasi pertanian yang lebih dekat dengan tradisi dan budaya agraris masyarakat.
- ¹⁰ Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (lihat Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Sumardjan, 1980, hlm. 5).
- ¹¹ Dalam drama itu disebut sebagai "Lembaga Marah Dasamuka", yang bertugas menyensor kemarahan agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan kekuasaan Kaisar.
- ¹² Pelarangan terhadap media massa (koran dan majalah) dan pertunjukan (pembacaan puisi, pertunjukan teater) dalam masa Orde Baru merupakan satu sisi dari wajah Orde Baru yang represif.

Daftar Pustaka

- Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Sumardjan (ed.). 1980. *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Pulsar
- Ali, Fahry. 1986. *Refleksi Paham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Crouch, Harold. 1980, "Kaum Militer: Masalah Pergantian Generasi", dalam *Prisma*, Edisi Februari 1980
- Lubis, Mochtar dan James Scott (ed.). 1993. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhaimin, Yahya A. 1991. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950--1980*. Jakarta: LP3ES
- Rendra. 1975, "Kisah Perjuangan Suku Naga". Jakarta: Bank Naskah DKJ
- Rendra. 1977, "Sekda". Jakarta: Bank Naskah DKJ
- Riantiaro. Nano. 1977. "*Maaf, Maaf, Maaf*".